

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**BESERTA**  
**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**BESERTA**  
**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Komisiner	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Neraca	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4 - 14

**SURAT PERNYATAAN KOMISIONER  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yurod Saleh, S.H., M.H.  
Alamat Kantor : Gedung Ex - Sentra Mulia, Lt.6  
Kompleks Kementrian Hukum dan HAM RI  
Jl. HR. Rasuna Said Kav X-6/8  
Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
Alamat domisili sesuai  
KTP atau kartu identitas lain : Komplek PTIK Flat AII/2 RT/RW. 008/002  
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Nomor telepon : 021-29101017  
Jabatan : Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional;
2. Laporan keuangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku di Indonesia.
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 April 2022

 **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**  
Ketua,



**Yurod Saleh, S.H., M.H.**

## Laporan Auditor Independen

No: 020/2.1347/AU.02/10/1060-1/4/IV/2022

Kepada Yth,  
Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional** terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian yang material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material, dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tetap sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Lembaga Manajemen Kolektif Nasional** tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

**KAP Manshur Dan Suharyono**  
Pimpinan Rekan

**Tubagus Manshur, SE., Ak., M.Si., BKP., CA., ACPA., CPA.**  
Nomor Register AP. 1060

Jakarta, 22 April 2022



**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**NERACA**

**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

*(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)*

	Catatan	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	4	15.137.665.364	16.679.233.918
Piutang royalti	5	17.095.293.836	14.951.227.088
Piutang lain-lain		2.796.113.888	-
Biaya dibayar dimuka		6.662.963	6.663.213
Pajak dibayar dimuka	10a	-	1.331.719.435
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b>35.035.736.051</b>	<b>32.968.843.654</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap - bersih	6	59.644.498	61.977.088
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b>59.644.498</b>	<b>61.977.088</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>35.095.380.549</b>	<b>33.030.820.742</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Kewajiban kepada pemilik hak	7	19.274.382.196	19.643.782.126
Utang lain-lain	8	13.590.099.930	14.049.718.411
Beban akrual	9	1.159.650.000	102.600.000
Utang pajak	10b	558.577.146	175.011.563
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>		<b>34.582.709.272</b>	<b>33.971.112.100</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Imbalan pasca kerja	11	631.000.000	-
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b>35.213.709.272</b>	<b>33.971.112.100</b>
<b>ASET BERSIH</b>			
Tidak terikat temporer		(118.328.723)	(940.291.358)
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>		<b>35.095.380.549</b>	<b>33.030.820.742</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**LAPORAN AKTIVITAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

*(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)*

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>PENERIMAAN DAN PENDAPATAN</b>			
Jasa manajemen	12	13.383.561.970	7.372.098.639
Pendapatan bunga bank dan jasa giro		207.659.184	396.950.506
Pendapatan lainnya		-	-
Jumlah pendapatan dan penerimaan		<u>13.591.221.154</u>	<u>7.769.049.145</u>
<b>BEBAN</b>			
Beban langsung		3.717.031.528	2.640.108.135
Beban operasional	13	8.672.835.343	6.066.267.351
Biaya meterai dan administrasi bank		41.531.855	80.026.516
Beban Lainnya		<u>133.181.181</u>	<u>47.001.404</u>
Jumlah beban		<u>12.564.579.907</u>	<u>8.833.403.406</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH SEBELUM PAJAK</b>		<u>1.026.641.247</u>	<u>(1.064.354.261)</u>
<b>BEBAN (MANFAAT) PAJAK</b>			
Pajak kini	10c	<u>204.678.612</u>	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH</b>		<u>821.962.635</u>	<u>(1.064.354.261)</u>
<b>ASET BERSIH AWAL TAHUN</b>		<u>(940.291.358)</u>	<u>124.062.903</u>
<b>ASET BERSIH AKHIR TAHUN</b>		<u>(118.328.723)</u>	<u>(940.291.358)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan royalti	11.239.495.222	1.522.005.526
Pembayaran kepada pemilik hak dan pihak ketiga	(6.958.346.276)	(7.681.694.465)
Pembayaran kepada pengurus dan karyawan	(4.897.478.221)	(3.399.309.128)
Penerimaan bunga bank dan jasa giro	207.659.184	396.950.506
Pembayaran pajak	1.510.606.406	528.182.758
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	(2.624.732.119)	4.961.807.539
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<u>(1.522.795.804)</u>	<u>(3.672.057.264)</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan aset tetap	(18.772.750)	(46.828.394)
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<u>(18.772.750)</u>	<u>(46.828.394,00)</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(1.541.568.554)</b>	<b>(3.718.885.658)</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<u>16.679.233.918</u>	<u>20.398.119.576</u>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u>15.137.665.364</u>	<u>16.679.233.918</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

---

1. UMUM

a. Pendirian

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah sebuah Lembaga Negara Bantu Eksekutif Non APBN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014, untuk mewakili pemilik lisensi atas hak cipta dan atau produk hak terkait, dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial, kepada pemilik lisensi tersebut. Atas kegiatan tersebut LMKN mendapatkan imbalan berupa jasa manajemen.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang efektif berlaku sejak 18 Oktober 2014, mengatur tentang pemberian lisensi atas Hak Cipta dan atau Produk Hak Terkait kepada pengguna yang bersifat komersial dan pemberian royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi satu ciptaan atau produk hak terkait tersebut.

Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan komersial.

Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Produser Fonogram dan Performer untuk kepentingan komersial.

Petunjuk teknis pelaksanaan proses pengelolaan royalti oleh LMKN diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan Dan Pendistribusian Royalti Lagu Dan Musik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Rumah Bercyanyi yang diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Anggaran dasar LMKN telah mengalami perubahan-perubahan, terakhir dengan akta No.4 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Ny. Sastriani Josoprawiro, SH., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AH-27878.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 13 September 2013 Tambahan No 101327/2013.

LMKN berkedudukan di Gedung Kementerian Hukum dan HAM RI, (Eks. Sentra Mulia) lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6/8, Jakarta Selatan 12940

b. Susunan Komisioner

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.KI.01.08 TAHUN 2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait Di Bidang Lagu Dan/Musik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan susunan komisioner LMKN untuk tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Brigjen Pol (P) Yurod Saleh SH., MH.
Wakil Ketua	: Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Anggota	
A. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat:	: Ir James Freddy Sundah (Pencipta) Rapin Mudiardjo Kawiradji SH., ACCS., S.Kom., CIP., CPL (Hak Terkait)

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM (Lanjutan)**

**b. Susunan Komisiner (lanjutan)**

B. Bidang Hukum dan Ligitasi	: Marulam Juniasi Hutaaruk SH (Pencipta) Rien Uthami Dewi SH (Hak Terkait)
C. Bidang Teknologi Informasi dan Database Musik	: Ebiet G Ade (Pencipta) Irfan Aulia S.Kom (Hak Terkait)
D. Bidang Koletif Royalti dan Lisensi	: Adi Adrian (Pencipta) Yessi Kumiawan ST (Hak Terkait)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING**

Kebijakan akuntansi dan pelaporan LMKN sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia. Prinsip akuntansi signifikan yang diterapkan secara konsisten di dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Komisiner bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK).

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dasar pengukuran dalam penyajian laporan keuangan adalah biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam akun terkait. Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disajikan dengan menggunakan dasar akuntansi akrual.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tidak dimasukkan sebagai setara kas. Kas terdiri atas kas tunai dan kas di bank.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah Indonesia Rupiah (IDR). Jika tidak dinyatakan lain, semua angka yang disajikan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh.

**c. Kas dan Setara Kas**

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.



**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)**

**d. Piutang Royalti**

Piutang royalti disajikan sebesar jumlah neto royalti yang ditagihkan kepada pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait.

**e. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian jangka panjang biaya dibayar di muka disajikan sebagai aset tidak lancar.

**f. Aset Bersih Terikat Temporer**

Neraca menyajikan masing masing kelompok aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembatasan permanen terhadap (1) aset, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*).

Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.

Aset bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

**g. Kewajiban Kepada Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait**

Disajikan sebesar royalti siap distribusi (*distributable royalty*) kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

**h. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan manajemen diakui berdasarkan persentase tertentu dari nilai tagihan ke pemakai hak. Besaran persentase tersebut ditetapkan melalui ketentuan dan/atau peraturan dan/atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga bank yang berlaku sedangkan pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual.

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)**

**h. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

Beban diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*). Beban ditangguhkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Beban bunga diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga yang berlaku.

**i. Perpajakan**

LMKN mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, LMKN harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. LMKN tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

**j. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja**

Sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 "Ketenagakerjaan" tanggal 25 Maret 2003, diluar program Pensiun Manfaat Pasti, LMKN berkewajiban memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi kepada karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK tersebut meliputi berhenti karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri secara terhormat. Besarnya kompensasi PHK ditentukan oleh sebab terjadinya PHK, jumlah masa kerja dan besarnya penghasilan tetap yang diterima karyawan pada bulan terakhir. Pada tahun 2021 LMKN telah membukukan kewajiban imbalan pasca kerja.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP mewajibkan LMKN untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**Estimasi dan asumsi**

LMKN mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali LMKN. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan terhadap adanya penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan berikutnya, diungkapkan di bawah ini.

**Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan**

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan beban yang dapat dikurangkan dalam mengestimasi provisi pajak penghasilan LMKN.

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI (Lanjutan)**

**Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan (lanjutan)**

Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan LMKN melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang pajaknya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atau Auditor Pemerintah. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi dari posisi pajak LMKN dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang atau jasa, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, belanja modal dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

**4. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kas		
Rupiah	2.245.018	728.095
Bank		
Rekening giro - Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.377.118.293	16.673.605.823
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.758.302.053	4.900.000
Jumlah bank	15.135.420.346	16.678.505.823
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>15.137.665.364</b>	<b>16.679.233.918</b>

Seluruh saldo bank milik LMKN ditempatkan pada bank BUMN dan tidak dibatasi penggunaannya.

**5. PIUTANG ROYALTI**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Indomarco Prismatama	3.362.345.675	1.186.813.072
PT Cakrawala Andalas Televisi	1.748.110.996	2.015.585.778
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk	1.119.546.247	1.119.546.247
PT Media Nusantara Citra Tbk	813.966.666	813.966.666
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	398.290.739	-
PT Imperium Happy Puppy	378.430.200	378.430.200
PT Delamibrands Kharisma Busana	328.950.805	328.950.805
PT Media Televisi Indonesia	290.852.780	162.215.157
PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	262.892.933	338.095.086
PT Vizta Mitra Indonesia	252.240.000	252.240.000
Dipindahkan	8.955.827.041	6.595.843.011

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

**5. PIUTANG ROYALTI (Lanjutan)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pindahan	8.955.627.041	6.595.843.011
PT Putra Agung Lestari	220.006.224	220.006.224
PT Matahari Department Store Tbk	200.719.905	-
PT Putera Mataram Mitra Sejahtera	177.704.790	175.504.790
Venus Karaoke	187.169.350	187.169.350
PT Mitra Suarasejati	180.455.150	187.655.150
PT Net Mediatama Televisi	156.880.595	417.758.687
PT Lativi Media Karya	154.978.313	154.978.796
CV Limas Hotel	152.773.200	152.773.200
PT Bakti Jaya Perkasa	132.598.800	132.598.800
PT Inti Cakrawala Citra	131.475.025	-
PT Lima Pilar Jaya Abadi	127.089.600	127.089.600
CV Selebriti	123.750.000	123.750.000
PT Tumbuh Sehat Makmur	104.858.000	104.858.000
PT Duta Nada Mas Prima	102.409.200	102.409.200
Persek Wahana Musik Indonesia	-	662.659.758
PT Kitchnette Lestari	-	177.804.000
PT Sari Coffee Indonesia	-	150.502.002
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000)	6.026.998.643	5.318.066.520
<b>Jumlah piutang royalti</b>	<b>17.095.293.836</b>	<b>14.951.227.088</b>

Merupakan saldo tagihan kepada pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait dan Hak Kekayaan Intelektual.

**6. ASET TETAP**

	<u>2021</u>			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
<b>Harga Perolehan :</b>				
Peralatan kantor	82.555.860	18.772.750	-	101.328.610
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>				
Peralatan kantor	20.578.772	21.105.340	-	41.684.112
<b>Nilai Buku</b>	<b>61.977.088</b>			<b>59.644.498</b>
	<u>2020</u>			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
<b>Harga Perolehan :</b>				
Peralatan kantor	35.727.466	46.828.394	-	82.555.860
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>				
Peralatan kantor	4.118.481	16.460.291	-	20.578.772
<b>Nilai Buku</b>	<b>31.608.985</b>			<b>61.977.088</b>

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

**7. KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG DAN PEMILIK HAK**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Wahana Musik Indonesia	5.650.122.412	4.955.099.713
Royalti	3.176.149.459	4.610.586.264
Karya Cipta Indonesia	2.861.707.867	2.415.362.281
Anugrah Royalti Dangdut Indonesia	1.831.865.745	1.831.865.745
Sentra Lisensi Musik Indonesia	1.802.238.628	2.536.568.914
<i>Unclaimed</i>	1.454.565.358	1.454.565.358
Royal Anugrah Indonesia	1.025.748.343	594.813.628
Hak Pencipta	728.292.937	728.292.937
Armindo	480.357.285	480.357.286
Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia	227.064.162	-
Wr Family	38.270.000	38.270.000
<b>Jumlah kewajiban kepada pemilik hak</b>	<b><u>19.274.382.196</u></b>	<b><u>19.643.782.126</u></b>

**8. UTANG LAIN-LAIN**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Hak yang belum di tentukan ( <i>Unidentified</i> )	9.978.579.018	11.943.195.800
Hak pencipta	1.328.687.258	1.328.687.258
Royalti diterima dimuka	871.653.645	-
Operasional LMK	487.217.541	-
PT Royalti Anugrah Indonesia	215.251.465	215.251.465
PT Wahana Musik Indonesia	150.000.000	150.000.000
PT AS Industri Rekaman Indonesia	150.000.000	150.000.000
PT Berkah Kreasi Nusantara	121.553.600	-
Karyawan	6.737.160	6.737.160
Lain-lain	280.420.243	255.846.728
<b>Jumlah utang lain-lain</b>	<b><u>13.590.099.930</u></b>	<b><u>14.049.718.411</u></b>

Utang lain-lain kepada PT Royalti Anugrah Indonesia, PT Wahana Musik Indonesia dan PT AS Industri Rekaman Indonesia, merupakan sisa utang atas pinjaman yang diterima Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada saat mulai beroperasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Lembaga. Pinjaman tersebut diterima tanpa dikenakan bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang tetap.

**9. BEBAN AKRUAL**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gaji	949.650.000	600.000
Jasa profesional	210.000.000	102.000.000
<b>Jumlah beban akrual</b>	<b><u>1.159.650.000</u></b>	<b><u>102.600.000</u></b>

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

**10. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar dimuka**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pajak Pertambahan Nilai	-	1.331.719.435
<b>Jumlah pajak dibayar dimuka</b>	<b>-</b>	<b>1.331.719.435</b>

**b. Utang pajak**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21	163.440.763	61.114.115
Pajak Penghasilan Pasal 29	173.743.174	48.221.023
<b>Jumlah utang pajak</b>	<b>558.577.146</b>	<b>175.011.563</b>

**c. Pajak Penghasilan Badan**

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak menurut laporan aktifitas dengan taksiran laba (rugi) menurut pajak adalah sebagai berikut :

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak menurut laporan aktifitas	1.026.641.247	(1.064.354.261)
Perbedaan fiskal terdiri :		
Perbedaan sementara		
Cadangan Imbalan Pasca Kerja Karyawan	631.000.000	-
Perbedaan tetap:		
Pendapatan jasa giro	(207.659.184)	(396.950.498)
Beban pajak	60.043.310	419.306.430
Biaya lainnya yang tidak dapat dikurangkan	298.520.538	363.329.151
<b>Jumlah beda tetap</b>	<b>150.904.664</b>	<b>385.685.083</b>
<b>Jumlah perbedaan fiskal</b>	<b>781.904.664</b>	<b>385.685.083</b>
Taksiran penghasilan neto - fiskal	1.808.545.911	(678.669.178)
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	(678.669.178)	-
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	1.129.876.000	(678.669.000)
<b>Taksiran pajak penghasilan</b>	<b>204.678.612</b>	<b>-</b>
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Pajak penghasilan pasal 23	30.935.438	-
<b>Utang pajak penghasilan pasal 29</b>	<b>173.743.174</b>	<b>-</b>

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

**11. IMBALAN PASCA KERJA**

Pada tanggal 31 Desember 2021, LMKN telah membentuk penyisihan dan mencatat kewajiban estimasi bersih imbalan pasca kerja uang jasa karyawan sebesar Rp631.000.000 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Imbalan pasca kerja" di neraca.

Pada tanggal 31 Desember 2021, LMKN masih menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003 untuk menghitung kewajiban imbalan pasca kerja sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil dan inkonstitusionalitas bersyarat.

LMKN akan melakukan penyesuaian terhadap perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja saat UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diberlakukan secara definitif.

**12. PENDAPATAN**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jasa manajemen royalti:		
Digital	6.065.382.705	4.522.164.657
Televisi	1.303.478.821	757.534.231
Mall	875.147.709	710.598.815
Karaoke	758.067.000	679.889.500
Hotel	682.853.999	343.833.324
Restoran	245.080.000	345.524.612
Transportasi	36.208.249	-
Diskotik	13.425.868	1.204.000
Radio	400.000	800.000
Executive	-	9.750.000
Rekreasi	-	799.500
Lainnya	3.403.517.621	-
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>13.383.561.970</b>	<b>7.372.098.639</b>

Pendapatan lainnya tahun 2021 merupakan pendapatan yang diterima dari PT Lentera Abadi Solusitama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Bab IV Dana Operasional Dan Dana Cadangan, Bagian Kedua: Dana Operasional, pasal 21 huruf 1 dijelaskan bahwa: LMKN dapat menggunakan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya (2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, pada pasal 18 dijelaskan bahwa LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan (2020).

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

**13. BIAYA OPERASIONAL**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gaji dan tunjangan	4.897.478.221	3.399.309.128
Perjalanan dinas	960.293.540	881.587.342
Imbalan pasca kerja	631.000.000	-
Jasa profesional	510.140.000	145.125.000
Operasional komisioner lama	500.000.000	112.500.000
Transportasi	231.947.195	387.770.605
Sosialisasi dan pelatihan	231.842.540	107.336.438
Asuransi	230.464.600	202.055.438
Perangkat lunak	164.241.068	120.568.999
Keperluan kantor dan ATK	67.304.180	75.409.492
BPJS	67.171.814	51.523.899
Rumah tangga kantor	38.058.883	78.111.271
Perbaikan dan pemeliharaan	22.576.000	5.702.700
Pengiriman dokumen	22.476.172	48.278.500
Penyusutan	21.105.340	16.480.291
Pajak	60.043.310	419.306.430
Sewa	9.220.480	9.056.320
Lisensi	-	3.000.000
Pendidikan dan pelatihan	-	2.850.000
Entertain dan jamuan	-	-
Lain-lain	7.472.000	317.500
<b>Jumlah beban operasional</b>	<b><u>8.672.835.343</u></b>	<b><u>6.066.267.351</u></b>

**14. KONTRAK PENTING**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik tanggal 30 Maret 2021, bab VI Ketentuan Penutup dijelaskan bahwa LMKN harus membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut pada sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (No.001/PKS/LMKN-LAS/V.2021) dan PT Lentera Abadi Solutama (No.001/PERJ.SILM/LMKN-LAS/V.2021) tanggal 19 Mei 2021, LMKN telah bekerja sama dengan PT Lentera Abadi Solutama (PT LAS) dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup sebagai berikut:

**A. Maksud dan tujuan**

1. PT LAS menyediakan jasa pembangunan/pembuatan seperangkat mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen tertentu dan mempunyai kemampuan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta meakukan seluruh kegiatan usahanya senilai Modal Investasi digunakan oleh Pihak pertama dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagsimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik/Lagu;
2. Memperkuat dukungan terhadap program dan kegiatan Pihak Pertama dalam pelaksanaan fungsi untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari Pihak Pertama kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait;

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

---

**14. KONTRAK PENTING (Lanjutan)**

3. Memperkuat upaya pengelolaan dan pelaksanaan pendistribusian Royalti dari Pihak Pertama kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
4. Meningkatkan efektifitas dan memaksimalkan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti dari Pihak Pertama kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait.

**B. Ruang lingkup**

1. Membangun dan/atau mengembangkan dan/atau mengelola program atau sistem SLIM dalam pelaksanaan fungsi untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta membuat koneksi terkait pencatatan atau penerimaan Royalti antara sistem SILM dengan sistem milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Membangun sistem distribusi Royalti untuk Pencipta, Produser, dan/atau Pelaku Pertunjukan, yang dapat mengintegrasikan pendistribusian, pencatatan, serta penerimaan Royalti.
3. Mendapatkan dan mengumpulkan data Penggunaan Secara Komersial oleh para pengguna secara adil dan transparan.
4. Pemberdayaan sumber daya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana harian yang bergerak di bidang:
  - a. keuangan;
  - b. manajemen;
  - c. teknologi informasi;
  - d. lisensi;
  - e. pengelolaan royalti; dan/atau
  - f. hukum.

**15. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan terlampir adalah tanggung jawab Komisiner LMKN dan telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 22 April 2022.